

Warga Taman BMW Tak Diberi Ganti Rugi

by : **Meita Annissa**

PBHI tegaskan penggusuran paksa warga sebagai pelanggaran HAM

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan tidak akan memberikan ganti bagi warga di Kawasan Taman Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BMW), Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alasannya, sejak jauh-jauh hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memperingatkan agar kawasan tersebut tidak ditempati. "Mereka kan sudah masuk tanpa ijin. Jadi tidak akan ada kompensasi," kata Fauzi kepada wartawan di Balai Kota, kemarin (25/8).

Gubernur DKI mengatakan setelah diperingati untuk segera meninggalkan taman, warga juga sudah diimbau untuk membongkar sendiri bangunan mereka. Namun baik peringatan lisan maupun tertulis, tidak diindahkan warga yang menempati lahan seluas 26,5 hektare itu. Karena itu, ketika ditanyakan solusi terhadap persoalan ini, Foke memilih untuk diam.

Secara terpidah, Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas mengatakan pemerintah kota tidak akan memberikan ganti rugi atau uang kerohiman bagi warga yang kehilangan rumah mereka di taman BMW. Namun sebagai gantinya, pihaknya bersedia untuk menyiapkan angkutan yang akan membawa warga ke kampung halaman mereka masing-masing. "Saat ini kita sedang mendata warga yang kemarin kena gusuran di BMW," jelasnya.

Setelah di data, lanjut Effendi, pemulangan ke kampung halaman akan dilakukan berdasarkan kelompok daerah asal masing-masing berdasarkan hasil data tadi. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pengangkutan yang dilakukan bisa berlangsung efektif. "Kalau tidak pakai bis, nanti pakai KA," tambah Effendi.

Selain tidak memberikan kompensasi apapun, Effendi juga sudah memerintahkan seluruh anggota mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi tertinggi untuk menjaga kawasan kolong tol agar para penghuni liar dari taman BMW tidak pindah ke wilayah itu seperti yang selama ini terjadi. "Kita sudah perintahkan untuk menjaga kolong tol," tandasnya.

Datangi Komnas HAM

Puluhan warga gusuran dari Taman BMW kemarin mendatangi Kantor Komnas HAM untuk mengadukan nasib mereka yang kini terlunta-lunta. "Penggusuran terhadap warga yang tinggal di Taman BMW termasuk dalam pelanggaran HAM karena telah membuat sekitar 1.200 KK terkatung-katung," kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Henrik Sirait, kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Henrik yang mendampingi warga gusuran ke Komnas HAM itu juga memaparkan, hingga kini belum ada rencana relokasi alternatif yang diajukan pemerintah kepada warga yang tergusur. Untuk itu, ujar dia, Komnas HAM seharusnya mendesak pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memberikan tempat atau lokasi pengganti baru bagi warga. Henrik juga menolak sebutan "penghuni liar" bagi korban penggusuran karena menurut dia, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Warga korban penggusuran yang tergabung dalam Forum Warga Taman BMW Menggugat datang ke Komnas HAM dengan menggunakan dua kendaraan, yaitu sebuah Metromini 24 (Senen - Tanjung Priok) dan sebuah mobil "pick-up" terbuka. Menurut seorang warga, Sukendar (50 tahun), pihaknya tidak menginginkan adanya penggusuran paksa, tetapi relokasi warga yang dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat dengan warga. "Sekarang, saya mau tinggal di mana padahal anak saya sendiri ada tiga orang," katanya seperti dikutip *Antara*.

Sementara warga lainnya, Romi, mengaku menjadi korban pemukulan aparat dan hingga kini masih kerap merasa pusing. Warga gusuran yang sesekali meneriakkan "Hidup Rakyat" dan "Kami Menuntut Keadilan" itu diterima oleh pihak Komnas HAM dan hingga kini masih mengadukan nasibnya kepada lembaga tersebut.

Pada Minggu (24/8) pagi pukul 07.00 WIB ratusan aparat gabungan dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan kawasan Taman BMW yang dihuni sekitar 1.112 kepala keluarga itu. Penertiban tersebut berlangsung ricu, karena warga menolak rumah mereka digusur. Kini, warga yang telah kehilangan rumah ini, memilih untuk tinggal di rel kereta api serta taman terdekat dari wilayah rumah mereka.